



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

***Komparasi Performance Based Management Systems***  
**Pada Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu**  
**Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Audrey Volare Esmeralda

2015310009

**Bandung**

**2019**



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Komparasi *Performance Based Management Systems***  
**Pada Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu**  
**Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)**

Skripsi

Oleh

Audrey Volare Esmeralda

2015310009

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP, MPA

**Bandung**

**2019**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



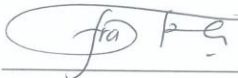
**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Audrey Volare Esmeralda  
Nomor Pokok : 2015310009  
Judul : Komparasi Performance Based Management Systems Pada Program  
Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 19 Desember 2019  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Tutik Rachmawati, Ph.D

: 

**Sekretaris**

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA

: 

**Anggota**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Audrey Volare Esmeralda

NPM : 2015310009

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : *Komparasi Performance Based Management Systems* Pada Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 09 Desember 2019

Audrey Volare Esmeralda

## ABSTRAK

Nama : Audrey Volare Esmeralda

NPM : 2015310009

Judul : Komparasi *Performance Based Management Systems* Pada Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

---

Pemerintah DKI Jakarta membentuk sebuah program subsidi pendidikan yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada tahun 2012 yang kemudian berubah menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) pada tahun 2018. Meskipun KJP Plus dirancang sebagai penyempurnaan program KJP, terdapat berbagai indikasi permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan alur pikir tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkomparasikan kinerja program KJP dan program KJP Plus.

Untuk menilai proses manajemen kinerja program, digunakan model *performance based management system*. Model ini memiliki tujuh variabel yang terdiri dari input, output, outcome, proses, efisiensi, kualitas, dan informasi penjas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Kedalaman informasi diperoleh dari berbagai aktor yang terlibat dalam program KJP dan KJP Plus antara lain pemerintah tingkat daerah (Dinas Pendidikan DKI Jakarta), pemerintah tingkat RT dan RW (RT dan RW Kelurahan Lenteng Agung), sekolah (SDN Lenteng Agung 01 Pagi), perbankan (Bank DKI), toko kebutuhan pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Input sumber daya yang besar pada KJP Plus belum memunculkan upaya sinergi program dibanding dengan KJP. 2) Berdasarkan dimensi output, KJP Plus lebih unggul karena memiliki lebih banyak penerima manfaat dibandingkan dengan KJP. 3) Berdasarkan variabel outcome, KJP Plus lebih banyak menghasilkan *uninteded* outcome dibandingkan dengan KJP. 4) Berdasarkan tahapan proses, KJP Plus masih memiliki banyak kendala pada tahap proses administrasi dan evaluasi dibanding KJP. 5) Berdasarkan penggunaan sumber daya KJP Plus belum efisien dibanding KJP karena keterlibatan aktor dan anggaran yang besar justru menghasilkan praktek dan potensi penyalahgunaan bantuan. 6) KJP Plus memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan KJP karena program tersebut menghasilkan lebih banyak keluhan dari orang tua penerima manfaat. 7) Kelemahan sistem administrasi KJP Plus pada tahap pengajuan, verifikasi, dan pencairan bantuan menjadi informasi yang menjelaskan gambaran kinerja program KJP Plus. Beberapa saran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah perbaikan mekanisme pengawasan program, pengembangan sistem IT untuk mendukung tata kelola program dan perbaikan sistem administrasi pengajuan, verifikasi data, serta pencairan dana bantuan.

Kata kunci: *Performance based management system*, subsidi pendidikan, KJP, KJP Plus.

## ABSTRACT

*Nama : Audrey Volare Esmeralda*

*NPM : 2015310009*

*Judul : Comparison of Performance Based Management Systems on Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) and Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)*

---

The DKI Jakarta Government established an education subsidy program namely the Kartu Jakarta Pintar (KJP) in 2012 which was later changed to the Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) in 2018. Although KJP Plus was designed as a refinement of the KJP program, there are various indications of problems in implementing the program. Based on this line of thought, this research is directed at comparing the performance of the KJP program and the KJP Plus program.

To assess the program performance management process, a *performance based management system* model is used in this research. This model has seven variables consisting of input, output, outcome, process, efficiency, quality, and explanatory information. The research method used is descriptive qualitative method. The researchers obtained depth information from various actors involved in the KJP and KJP Plus programs such as local government (Dinas Pendidikan DKI Jakarta), RT and RW (RT and RW Lenteng Agung District), schools (SDN Lenteng Agung 01 Pagi), banking (Bank DKI), education store needs.

The results of this study show that: 1) The large resource input on KJP Plus has not led to program synergy efforts compared to KJP. 2) Based on the output dimension, KJP Plus is superior because it has more beneficiaries compared to KJP. 3) Based on outcome variables, KJP Plus produces more unintended outcomes compared to KJP. 4) Based on the stages of the implementation process, KJP Plus still has many obstacles at the administrative and evaluation process stages compared to KJP. 5) Based on the use of KJP Plus resources, it has not been efficient compared to KJP because the involvement of actors and a large budget actually results in practices and potential misuse of aid. 6) KJP Plus has a lower quality than KJP because the program generates more complaints from beneficiary parents. 7) Weaknesses in the KJP Plus administration system at the stage of submitting, verifying, and disbursing assistance into information that explains the performance description of the KJP Plus program. Some suggestions formulated in this research are improvement of program supervision mechanisms, development of IT systems to support program governance and improvement of administrative systems for submission, data verification, and disbursement of aid funds.

**Keywords:** *Performance Based Management Systems, Education Subsidies, KJP, KJP Plus.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atau segala rahmatNya sehingga Skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Skripsi merupakan tugas akhir yang bersifat wajib dan harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti menyadari bahwa Skripsi ini tidak bisa tersusun dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena melalui rahmatNya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi.
3. Ibu Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi.
4. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA, selaku dosen pembimbing peneliti yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, dan ilmu-ilmunya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
6. UPT P4OP (Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan) Dinas Pendidikan DKI Jakarta
7. SDN Lenteng Agung 01 Pagi Jakarta Selatan
8. Keluarga peneliti (Papi, Mami, Claudine, Rio, Richard, dan Xerxes) yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungannya kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini
9. Teman-teman peneliti yang tiada hentinya memberikan doa serta dukungannya kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas kebaikan serta bantuan yang telah mereka berikan kepada peneliti, dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Bandung, 02 Desember 2019

Peneliti,

Audrey Volare Esmeralda

2015310009



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	14
1.3    Tujuan Penelitian .....	14
1.4    Manfaat Penelitian .....	14
<b>1.4.1    Manfaat Teoritis</b> .....	14
<b>1.4.2    Manfaat Praktis</b> .....	15
1.5    Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b> .....	18
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	18
2.1    Kebijakan Publik dan Program Sektor Publik .....	18
2.2    Pengukuran Kinerja Program Sektor Publik .....	22
2.3    Kebijakan Pendidikan .....	24
2.4    Penilaian Kinerja Program Berdasarkan <i>Performance Based             Management Systems</i> .....	29
<b>BAB III</b> .....	37
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	37
3.1    Tipe Penelitian .....	37
3.2    Peran Peneliti .....	41
3.3    Lokasi Penelitian .....	42
3.4    Prosedur Pengumpulan Data .....	42

3.5	Analisis Data .....	49
3.6	Pengecekan Keabsahan Temuan .....	51
3.7	Operasionalisasi Variabel.....	53
<b>BAB IV</b>	.....	<b>58</b>
<b>PROFIL PENELITIAN</b>	.....	<b>58</b>
4.1	Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).....	58
4.2	Profil UPT P4OP (Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan) .....	62
<b>4.2.1</b>	<b>Tugas Pokok dan Fungsi UPT P4OP</b> .....	63
<b>4.2.2</b>	<b>Visi Misi UPT P4OP</b> .....	65
<b>4.2.3</b>	<b>Struktur Organisasi UPT P4OP</b> .....	66
<b>4.2.4</b>	<b>Dasar Hukum UPT P4OP</b> .....	67
<b>4.2.5</b>	<b>Lokasi UPT P4OP</b> .....	68
4.3	Profil Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lenteng Agung 01 Pagi.....	68
<b>4.3.1</b>	<b>Struktur Organisasi SDN Lenteng Agung 01 Pagi</b> .....	69
<b>4.3.2</b>	<b>Lokasi SDN Lenteng Agung 01 Pagi</b> .....	70
<b>4.3.3</b>	<b>Toko Romi Jaya Pasar Minggu</b> .....	70
4.4	Toko Kayla Fashion .....	71
4.5	Toko Siaga Fotocopy Stationery .....	72
<b>BAB V</b>	.....	<b>73</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>73</b>
5.1	Input.....	75
5.2	Output.....	81
5.3	Outcome .....	85
5.4	Proses.....	94
5.5	Efisiensi .....	102
5.6	Kualitas.....	107
5.7	Informasi Penjelas .....	112
<b>BAB VI</b>	.....	<b>116</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	<b>116</b>
6.1	Kesimpulan.....	116
6.2	Saran.....	119

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	120
<b>LAMPIRAN</b> .....	125

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 1.2 Klasifikasi Nilai IPM 10 Provinsi .....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 1.3 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Indonesia dengan Harapan Lama Sekolah DKI Jakarta Tahun 2010-2017 .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1.4 Perbedaan Manfaat yang diharapkan antara Program KJP dan KJP Plus .....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 1.5 Indikasi Masalah Masing-masing Program.....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 4.1 Jumlah Besaran Dana KJP Plus yang diterima siswa-siswi</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.2 Detail SDN Lenteng Agung 01 Pagi.....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 5.1 Komparasi Aktor Program KJP dan KJP Plus .....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 5.2 Perbedaan Alokasi Dana KJP dan KJP Plus.....</b>	<b>84</b>
<b>Tabel 5.3 Perbedan Dampak dan Manfaat Program KJP dan KJP Plus .....</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 5.4 Intended dan Unintended Outcome dari Program KJP dan KJP Plus.....</b>	<b>88</b>
<b>Tabel 5.5 Perbedaan Program KJP dan KJP Plus .....</b>	<b>93</b>
<b>Tabel 5.6 Kekurangan dan Hambatan Proses Program KJP Plus di SDN Lenteng Agung 01 Pagi.....</b>	<b>97</b>
<b>Tabel 5.7 Perbedaan SDM KJP dan KJP Plus.....</b>	<b>102</b>

<b>Tabel 5.8 Perbandingan Daftar Jenis Toko dan Barang yang Dapat Dibeli dengan Menggunakan Dana KJP dan KJP Plus .....</b>	<b>106</b>
<b>Tabel 5.9 Perbedaan Kepuasan dan Keluhan Program KJP dan KJP Plus .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1 IPM Indonesia Tahun 2010-2017 .....</b>	<b>2</b>
<b>Grafik 1.2 10 Provinsi dengan IPM Tertinggi Tahun 2017.....</b>	<b>3</b>
<b>Grafik 1.3 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia dengan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta Tahun 2010-2017....</b>	<b>5</b>
<b>Grafik 5.1 Perbedaan Jumlah Siswa Penerima KJP dan KJP Plus</b>	<b>82</b>
<b>Grafik 5.2 Besaran Anggaran Program KJP dan KJP Plus .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1 Tampak Depan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)</b> .....	61
<b>Gambar 4.2 Tampak Belakang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)</b> .....	61
<b>Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi UPT P4OP</b> .....	66
<b>Gambar 4.4 Alamat Lokasi UPT P4OP</b> .....	68
<b>Gambar 4.5 Struktur Organisasi SDN Lenteng Agung 01 Pagi ..</b>	69
<b>Gambar 4.6 Struktur Organisasi Komite Sekolah SDN Lenteng Agung 01 Pagi</b> .....	70
<b>Gambar 4.7 Peta Lokasi Toko Romi Jaya</b> .....	71
<b>Gambar 4.8 Lokasi Kayla Fashion</b> .....	71
<b>Gambar 4.9 Lokasi Toko Siaga Fotocopy</b> .....	72
<b>Gambar 5.1 Perbedaan Prosedur Administrasi Pengajuan KJP dan KJP Plus</b> .....	95
<b>Gambar 5.2 Toko Romi Jaya Pasar Minggu</b> .....	100
<b>Gambar 5.3 Toko Siaga Fotocopy Stationery</b> .....	101
<b>Gambar 5.4 Toko Kayla Fashion</b> .....	101

## **DAFTAR SINGKATAN**

KJP	: Kartu Jakarta Pintar
KJP Plus	: Kartu Jakarta Pintar Plus
P4OP	: Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
P6O	: Pusat Perencanaan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu dalam beradaptasi di suatu lingkungan. Hal tersebut membuat pendidikan menjadi instrumen yang penting. Pendidikan mempunyai tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas karena dengan adanya sektor pendidikan diharapkan sumber daya manusia bisa lebih siap dan cepat paham dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan dan pembangunan suatu negara. Pendidikan merupakan modal paling dasar bagi pembangunan suatu negara dan selain itu juga pendidikan harus didukung dengan kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai pendidikan yang sesuai. Indonesia memiliki peraturan atau dasar hukum mengenai pendidikan yang sebagaimana sudah tercantum pada Pasal 31 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap WNI wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah, tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan terciptanya WNI yang berkualitas.

Pendidikan menjadi sektor pembangunan utama. Pemikiran ini dapat dipahami karena pendidikan menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menjadi alat ukur keberhasilan yang paling dasar dalam membangun kualitas hidup manusia.

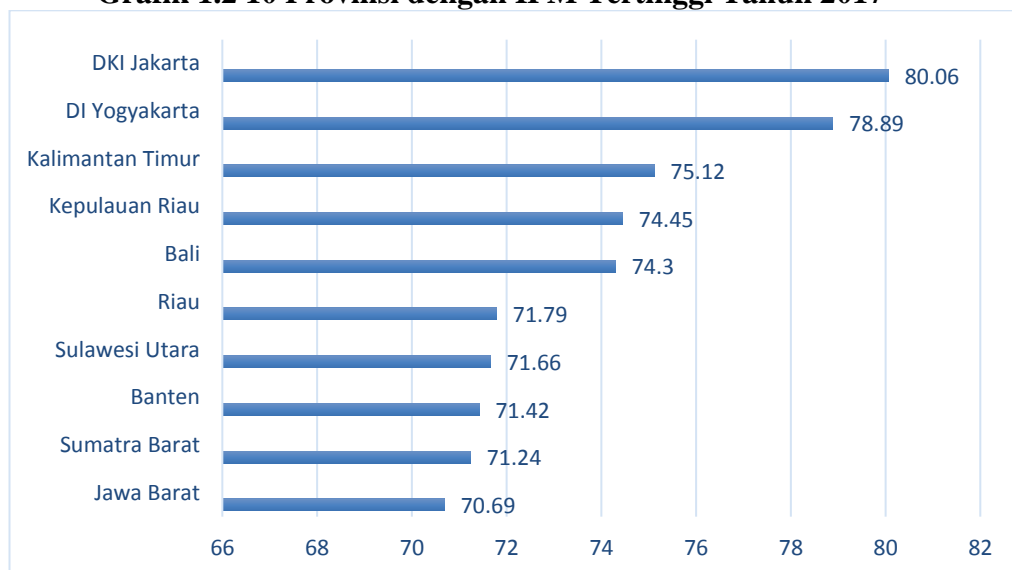
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selalu mengalami tren peningkatan indeks dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Data IPM Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017 menunjukkan bahwa IPM yang ada di Indonesia selalu mengalami peningkatan sebesar 0,89% per tahunnya yang berarti secara tidak langsung sektor pendidikan juga mengalami peningkatan.

**Grafik 1.1 IPM Indonesia Tahun 2010-2017**



*Sumber: Diolah oleh peneliti dari "Berita Resmi Statistik IPM Indonesia 2017 No. 33/04" (BPS)*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Indonesia mengalami peningkatan pada setiap tahunnya karena adanya kontribusi IPM dari tiap-tiap provinsi. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) membuat grafik mengenai sepuluh provinsi yang memiliki IPM tertinggi.

**Grafik 1.2 10 Provinsi dengan IPM Tertinggi Tahun 2017**

Sumber: Diolah oleh peneliti dari "Berita Resmi Statistik IPM Indonesia 2017 No. 33/04" (BPS)

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati pada posisi pertama dalam sepuluh provinsi dengan IPM tertinggi pada tahun 2017. Secara status, DKI Jakarta masuk dalam kategori yang sangat tinggi dengan indeks sebesar 80,06. Klasifikasi DKI Jakarta dengan indeks tertinggi dapat diukur dengan pengklasifikasian IPM berikut:

**Tabel 1.1 Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia**

Klasifikasi	Capaian IPM
Sangat Tinggi	IPM yang nilainya lebih dari 80
Tinggi	IPM yang nilainya antara 70-80
Sedang	IPM yang nilainya antara 60-70
Rendah	IPM yang nilainya kurang dari 60

Sumber: Diolah oleh peneliti dari website resmi BPS

**Tabel 1.2 Klasifikasi Nilai IPM 10 Provinsi**

Provinsi	Nilai IPM	Klasifikasi IPM
DKI Jakarta	80,06	Sangat Tinggi
DI Yogyakarta	78,89	Tinggi
Kalimantan Timur	75,12	Tinggi
Kepulauan Riau	74,45	Tinggi
Bali	74,30	Tinggi
Riau	71,79	Tinggi
Sulawesi Utara	71,66	Tinggi
Banten	71,42	Tinggi
Sumatra Barat	71,24	Tinggi
Jawa Barat	70,69	Tinggi

*Sumber: Diolah oleh peneliti*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta yang tinggi merupakan salah satu hasil kontribusi dari sektor pendidikan yang dapat dibuktikan dalam tabel 1.3 dan grafik 1.4 Terdapat dua variabel yang menentukan indeks pendidikan, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Variabel pertama yang menjadi indikator dari indeks pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Definisi dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> “Sirusa: Definisi Rata-rata Lama Sekolah”, diakses dari web <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=572>, pada tanggal 24 April 2019 pukul 17.51

**Grafik 1.3 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia dengan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta Tahun 2010-2017**



*Sumber: Diolah oleh peneliti dari BPS tahun 2017*

Grafik 1.3 menunjukkan adanya perbedaan angka pada variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) DKI Jakarta dan dapat dilihat bahwa Rata-rata Lama Sekolah DKI Jakarta lebih tinggi.

Variabel kedua selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> T Puji Astuti, "Harapan Lama Sekolah.", diakses dari web <http://pekalonganbersekolah.pekalongankota.go.id/harapan-lama-sekolah-hls/>, pada tanggal 24 April 2019 pukul 17.53

**Tabel 1.3 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Indonesia dengan Harapan Lama Sekolah DKI Jakarta Tahun 2010-2017**

Tahun	RLS Indonesia	RLS DKI Jakarta
2010	11.29	11.86
2011	11.44	11.91
2012	11.68	11.96
2013	12.10	12.24
2014	12.39	12.38
2015	12.55	12.59
2016	12.72	12.73
2017	12.85	12.86

*Sumber: Diolah oleh peneliti dari BPS tahun 2017*

Tabel 1.3 menunjukkan adanya perbedaan terhadap harapan lama sekolah tingkat nasional dengan Provinsi DKI Jakarta yang dimana dari grafik 1.3 terlihat bahwa indeks HLS DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan indeks HLS Indonesia.

Berdasarkan grafik 1.3 dan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa DKI Jakarta bisa menjadi barometer pendidikan di Indonesia karena angka indeks yang lebih tinggi dari indeks nasional. Hal itu didukung juga dengan DKI Jakarta yang berada pada urutan pertama dalam provinsi dengan IPM tertinggi tahun 2017.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Disdik (Dinas Pendidikan) Provinsi DKI Jakarta membentuk sebuah program yang dinamakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2012. Dalam hal untuk menjalankan program tersebut, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan berupa pemberian dana bagi keluarga yang tidak mampu dan kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut dengan BOP dan BBPP. Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan mewujudkannya dengan sebuah program yang disebut KJP (Kartu Jakarta Pintar)

Kartu Jakarta Pintar (KJP) pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 oleh Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kartu Jakarta Pintar (KJP) memiliki mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Atas dasar peraturan yang telah dibentuk, dapat dikatakan bahwa KJP merupakan program pembiayaan personal yang dibiayai secara penuh dari dana APBD DKI Jakarta. Kartu Jakarta Pintar ditujukan bagi siswa-siswi yang kurang mampu di DKI Jakarta dan memiliki tujuan untuk mendukung terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun dan di awal peluncurannya Program KJP hanya memiliki kelompok sasaran pada siswa-siswi SMA maupun SMK di DKI Jakarta, lalu pada tahun 2013 skema dari Program KJP berubah tidak lagi hanya kepada siswa-siswi SMA/SMK tetapi kelompok sasaran KJP bertambah yaitu kepada siswa-siswi yang berasal dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga sejak tahun 2013 Program KJP diberikan kepada siswa-siswi yang ada dari jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA/SMK. Dari Program KJP tersebut, diharapkan dengan dibentuknya Program KJP, jumlah siswa-siswi putus sekolah di DKI Jakarta dapat berkurang.

Pada pertengahan tahun 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus. Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) merupakan program strategis untuk memberikan akses bagi siswa-siswi di DKI Jakarta yang berasal baik dari kalangan mampu maupun tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK.<sup>3</sup> Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) tahun 2018 dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap satu pada bulan Juni 2018 dan tahap dua pada bulan Oktober 2018. Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dinilai lebih unggul dalam manfaat dan keuntungannya dibandingkan dengan KJP. Perbedaan yang membuat KJP Plus lebih unggul dibandingkan dengan KJP membuat KJP Plus diharapkan dapat memberikan manfaat dan efek yang lebih dirasakan oleh siswa-siswi DKI Jakarta. Terdapat pula perbedaan manfaat dan keuntungan antara KJP dan KJP Plus yang akan dibentuk dalam sebuah tabel:

**Tabel 1.4 Perbedaan Manfaat yang diharapkan antara Program KJP dan KJP Plus**

No.	KJP	KJP Plus
1.	Seluruh siswa-siswi di DKI Jakarta dapat menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jengan SMA/SMK	Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun yang sekolah maupun tidak sekolah, Kelompok Belajar Paket A,B, dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan

<sup>3</sup> KJP: “Informasi Umum”, diakses dari web [http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi\\_umum.php?id=eydpZCc6J2M3NGQ5N2IwMWVhZTI1N2U0NGFhOWQ1YmFkZTk3YmFmJywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcvNDVhMDVmOWNmOCd9](http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6J2M3NGQ5N2IwMWVhZTI1N2U0NGFhOWQ1YmFkZTk3YmFmJywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcvNDVhMDVmOWNmOCd9), pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 10.56



		pendidikan menengah dan untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun
2.	Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dapat meningkat secara signifikan	Meringankan biaya personal pendidikan
3.	Peningkatan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) di pendidikan dasar dan menengah.	Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi
4.		Mendorong siswa putus sekolah ( <i>drop out</i> ) agar mendapat layanan pendidikan di sekolah atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Lembaga Khusus Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan non-formal lainnya
5.		Meningkatkan pencapaian target APK pendidikan dasar dan menengah
6.		Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi

Sumber: Diolah oleh peneliti dari website resmi KJP ([kjp.go.id](http://kjp.go.id))

Dapat dilihat bahwa manfaat dan dampak positif dari Program KJP Plus cukup lebih unggul dengan adanya enam indikator manfaat dari KJP Plus dibandingkan dengan Program KJP yang hanya memiliki tiga indikator penting dalam manfaat dan

dampak positif. KJP Plus juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh KJP, sehingga hal ini juga membuat KJP Plus lebih unggul dibandingkan dengan KJP. Keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang dirasakan secara langsung oleh siswa-siswi pengguna KJP Plus.

Kelebihan Program KJP Plus ini merupakan keuntungan yang dirasakan secara langsung oleh siswa-siswi pengguna KJP Plus, diantaranya adalah:

1. Jumlah dana yang diterima siswa untuk setiap jenjang pendidikan lebih besar dibandingkan dengan Program KJP;
2. Bisa digunakan secara tunai (ongkos transportasi dan uang saku) dan non-tunai (perlengkapan sekolah);
3. Terdapat dana tambahan bagi siswa kelas XII sebesar Rp 500.000 untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi untuk siswa-siswi SMA, dan Biaya Sertifikasi Profesi untuk siswa-siswi SMK;
4. Memiliki akses gratis untuk masuk tempat rekreasi dan edukasi seperti Taman Impian Jaya Ancol, dan museum-museum yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya, baik Program KJP dan Program KJP Plus memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kemudahan bagi seluruh anak yang berada di DKI Jakarta untuk dapat menamatkan pendidikannya sampai dengan SMA/SMK dan terutama untuk anak-anak yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa kartu yang dimana bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga siswa-siswi yang

kurang mampu bisa dibantu dan meringankan beban dari orang tua siswa dan diharapkan dengan adanya program KJP Plus dari Pemerintah, angka partisipasi pendidikan untuk anak sekolah dapat meningkat.

Sebuah program yang sedang berjalan tentunya memiliki masalahnya masing-masing begitu pula dengan Program KJP dan KJP Plus yang memiliki kendala dalam mencapai tujuannya dan masalah tersebut muncul bersamaan dengan berjalannya program tersebut.

Permasalahan yang dialami oleh Program KJP antara lain:

1. Terlambatnya pencairan dana KJP dan berkurangnya jumlah saldo yang ada pada KJP.<sup>4</sup>
2. Terdapat indikasi siswa yang sudah mendapatkan rekening dan kartu KJP namun tidak menerima dana bantuan pendidikan.<sup>5</sup>
3. Masih banyaknya terjadi penerima KJP ganda yang menerima uang bantuan dua kali akibat pengambilan *sampling* yang dilakukan Bank DKI.<sup>6</sup>

Meskipun Program KJP Plus didesain sebagai jaminan pendidikan yang memiliki kelebihan dari KJP, Program KJP Plus juga memiliki indikasi masalah

---

<sup>4</sup> R Sadikin, "Dana Belum Dicairkan, Pemegang KJP Temukan Fakta Ini saat Bertanya ke Bank.", *Tribun News*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/08/dana-belum-dicairkan-pemegang-kjp-temukan-fakta-ini-saat-bertanya-ke-bank?page=1>, pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 17.51

<sup>5</sup> D Raoni, "Ada Banyak Penyimpangan di Kartu Jakarta Pintar", *JPNN News*, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/ada-banyak-penyimpangan-di-kartu-jakarta-pintar>, pada tanggal 07 November 2019 pukul 23.43

<sup>6</sup> Megiza, "Sekolah Bakal Kejar Orang Tua Penerima KJP Ganda", *CNN Indonesia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201509252124132-20-81030/sekolah-bakal-kejar-orang-tua-penerima-kjp-ganda>, pada tanggal 07 November 2019 pukul 18.17

yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada Program KJP. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Penyalahgunaan fungsi dari KJP Plus karena terdapat indikasi orang tua siswa penerima KJP Plus menggunakan dana KJP Plus bukan untuk kebutuhan pendidikan anaknya, melainkan kebutuhan lain seperti pembelian kosmetik.<sup>7</sup>
2. Saldo terpotong karena kesalahan sistem perbankan yang masih belum optimal
3. EDC (*eletronic data capture*) jaringan prima kerap gagal namun saldo tetap terdebit dan hal ini dialami sekitar 19.000 transaksi dengan nilai sebesar Rp 5 miliar.<sup>8</sup>
4. Sepanjang semester pertama diberlakukannya KJP Plus, baru sekitar 50% KJP Plus yang dicairkan dengan total anggaran Rp1,8 triliun, padahal APBD DKI Jakarta tahun 2018 menetapkan alokasi anggaran untuk KJP Plus sebesar Rp3,9 triliun.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, hal ini membuktikan bahwa baik Program KJP dan KJP Plus memiliki masalahnya masing-masing yang

---

<sup>7</sup> A-L, "KJP Plus Tak Tepat Sasaran, Bisa Dipakai Beli Makeup, Tarik Dana Hingga Digadai.", *Warta Kota*, diakses dari web <http://wartakota.tribunnews.com/2019/01/10/kjp-plus-tak-tepat-sasaran-bisa-dipakai-beli-makeup-tarik-dana-hingga-digadai>, pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 18.42

<sup>8</sup> L-T Tambun, "Program KJP Plus Banjir Keluhan.", *Berita Satu*, diakses dari web <https://www.beritasatu.com/megalopolis/481536-program-kjp-plus-banjir-keluhan.html>, pada tanggal 17 Maret 2019, pukul 18.03

<sup>9</sup> Mikhael Gewati, "KJP Plus Sudah Tersalurkan ke 805.015 Siswa Ibu Kota.", *KOMPAS*, diakses dari web <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/12/07582571/kjp-plus-sudah-tersalurkan-ke-805015-siswa-ibu-kota>, pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 18.16

diakibatkan dari dua faktor yaitu internal dan eksternal, faktor internal terjadi karena kurangnya pengawasan yang intensif atau berkala yang disebabkan karena lemahnya manajemen pengawasan dari *stakeholders*, sedangkan faktor eksternal terjadi karena masyarakat yang melakukan penyalahgunaan dalam fungsi awal dari KJP Plus itu sendiri. Indikasi masalah dari masing-masing program KJP dan KJP Plus adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Indikasi Masalah Masing-masing Program**

<b>KJP</b>	<b>KJP Plus</b>
Pencairan dana kerap terlambat <sup>10</sup>	Penyalahgunaan fungsi KJP Plus akibat dapat dicairkan <sup>11</sup>
Dana tidak tersalurkan dengan baik <sup>12</sup>	Sistem EDC yang kerap error <sup>13</sup>
Ditemukan pengguna KJP ganda <sup>14</sup>	Alokasi anggaran belum merata <sup>15</sup>

Sumber: Diolah oleh peneliti

<sup>10</sup> D Raoni, "Ada Banyak Penyimpangan di Kartu Jakarta Pintar", *JPNN News*, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/ada-banyak-penyimpangan-di-kartu-jakarta-pintar>, pada tanggal 07 November 2019 pukul 23.43

<sup>11</sup> A-L, "KJP Plus Tak Tepat Sasaran, Bisa Dipakai Beli Makeup, Tarik Dana Hingga Digadai.", *Warta Kota*, diakses dari web <http://wartakota.tribunnews.com/2019/01/10/kjp-plus-tak-tepat-sasaran-bisa-dipakai-beli-makeup-tarik-dana-hingga-digadai>, pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 18.42

<sup>12</sup> R Sadikin, "Dana Belum Dicairkan, Pemegang KJP Temukan Fakta Ini saat Bertanya ke Bank.", *Tribun News*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/08/dana-belum-dicairkan-pemegang-kjp-temukan-fakta-ini-saat-bertanya-ke-bank?page=1>, pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 17.51

<sup>13</sup> L-T Tambun, "Program KJP Plus Banjir Keluhan.", *Berita Satu*, diakses dari web <https://www.beritasatu.com/megalopolis/481536-program-kjp-plus-banjir-keluhan.html>, pada tanggal 17 Maret 2019, pukul 18.03

<sup>14</sup> Megiza, "Sekolah Bakal Kejar Orang Tua Penerima KJP Ganda", *CNN Indonesia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201509252124132-20-81030/sekolah-bakal-kejar-orang-tua-penerima-kjp-ganda>, pada tanggal 07 November 2019 pukul 18.17

<sup>15</sup> Mikhael Gewati, "KJP Plus Sudah Tersalurkan ke 805.015 Siswa Ibu Kota.", *KOMPAS*, diakses dari web <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/12/07582571/kjp-plus-sudah-tersalurkan-ke-805015-siswa-ibu-kota>, pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 18.16

Dalam melihat masalah mengenai implementasi program KJP Plus yang lebih riil dibutuhkan adanya komparasi atau perbandingan yang dihubungkan dengan program sebelumnya yaitu KJP dengan cara melihat perbedaan pada kinerja antara KJP dan KJP Plus.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komparasi *Performance Based Management Systems* pada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman perbandingan kinerja antara program KJP dan KJP Plus.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang komparasi kinerja program subsidi pendidikan.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dalam menambah pengetahuan dan wawasan secara khusus mengenai komparasi kinerja program subsidi pendidikan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perbaikan administrasi atau tata kelola program KJP Plus oleh Dinas Pendidikan dan UPT P4OP.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi dokumen evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan UPT P4OP dalam pengembangan program KJP Plus

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memiliki tujuan dalam hal agar dapat memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasana dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan sistematika penelitian yang merupakan garis besar dari penelitian ini, yaitu:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Pada bab I akan diuraikan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang penelitian, apa saja yang menjadi fokus utama dalam penelitian, perumusan masalah penelitian, lalu tujuan dan manfaat apa yang ingin dicapai dari penelitian ini, serta bagaimana sistematika penelitian.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA.** Dalam bab ini akan dijelaskan lebih dalam lagi mengenai kebijakan, seperti implementasi kebijakan, kebijakan publik, kebijakan pendidikan, dan teori serta model apa yang digunakan dalam penelitan ini.

BAB III: METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian seperti metode yang digunakan, jenis penelitian apa yang digunakan, dimana lokasi penelitian, bagaimana metode pengumpulan data, hingga analisis data.

BAB IV: PROFIL. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian. Tahap awal menjelaskan tentang gambaran umum dari KJP Plus.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil temuan penelitian di lapangan.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan dari hasil penelitian yang ditemukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA. Berisi mengenai sumber apa saja yang digunakan dalam penelitian ini.